

PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP SKALA KECIL DI KABUPATEN KOLAKA, SULAWESI TENGGARA

Analysis of Small Scale Catch Fisheries Business in Kolaka District, South Sulawesi

Ramlah S¹, *Hasan Eldin Adimu¹, Asni¹, dan Latifa Fekri²

¹Fakultas Pertanian Perikanan dan Peternakan, Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Jl. Pemuda No. 339, Kolaka Sulawesi Tenggara, Indonesia

²Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Manajemen Sumberdaya Perairan, Universitas Halu Oleo
Jl. Anduonohu, Kec. Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Diterima tanggal: 17 Nopember 2021; Diterima setelah perbaikan: 14 Maret 2022;
Disetujui terbit: 21 Juni 2022

ABSTRAK

Sektor perikanan tangkap memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Salah satunya dengan pengembangan usaha nelayan skala kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pengembangan usaha perikanan skala kecil dan menganalisis tingkat efisiensi jenis alat tangkap nelayan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Data yang digunakan adalah data primer berdasarkan hasil wawancara langsung di lapangan serta data sekunder dikumpulkan dari instansi pemerintah terkait. Kegiatan usaha perikanan tangkap skala kecil, khususnya pada alat tangkap pancing tonda dan rawai dasar, memiliki nilai efisiensi yang rendah jika dilihat dari nilai profitabilitasnya, yaitu 20% dan 30%, jika dibandingkan dengan alat tangkap jala jatuh berkapal dan bagan dengan nilai profitabilitas, yaitu 40% dan 50%. Secara umum, perikanan skala kecil di Kolaka masih sangat memiliki ketergantungan dengan pemilik modal usaha untuk menjalankan kegiatan perikanan. Pengembangan usaha perikanan, khususnya pada alat tangkap yang memiliki nilai efisiensi rendah, perlu bantuan modal yang besar untuk meningkatkan nilai pendapatannya. Kebijakan perikanan skala kecil di Kabupaten Kolaka dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perikanan Tangkap, khususnya pada bidang pemberdayaan nelayan skala kecil.

Kata Kunci: alat tangkap; nelayan; usaha perikanan; perikanan skala kecil

ABSTRACT

The capture fisheries sector has an important role in efforts to improve the community's economy, one of which is the development of small-scale fishing businesses. This study aims to determine the potential for developing small-scale fisheries and to analyze the efficiency level of types of fishing gear. The research location is in Kolaka Regency, Southeast Sulawesi Province, the data used is primary data based on the results of direct interviews in the field and secondary data collected from relevant government agencies. Small-scale capture fishery business activities, especially in line fishing gear and basic longlines, have low-efficiency values seen from their profitability values, namely 20%, and 30% compared to fishing gear, Jalah Jatu, and boats, with profitability values of 40% and 50%, respectively. In general, small-scale fisheries in Kolaka are still very dependent on business capital owners to carry out fishing activities. The development of fisheries business, especially in fishing gear that has a low-efficiency value, requires large capital assistance to increase the value of its income. Small-scale fisheries policies in Kolaka Regency are managed by the Capture Fisheries Technical Implementation Unit, especially in the field of empowering small-scale fishermen.

Keywords: fishing gear; fisherman; fishery business; small-scale fisheries

PENDAHULUAN

Sektor perikanan tangkap di Indonesia memiliki peran yang penting bagi perekonomian. Hal ini terlihat dari banyaknya pelaku utama di sektor ini (Stacey *et al.*, 2021). Kawasan timur Indonesia (KTI) terkenal memiliki potensi perikanan dan

merupakan mata pencaharian pokok masyarakat di wilayah pesisir dan laut (Manurung, 2016). Perikanan tangkap merupakan suatu sistem yang memiliki peran penting dalam perekonomian, penyediaan pangan, kesempatan kerja, perdagangan, dan kesejahteraan, serta rekreasi (Halim *et al.*, 2018; Kusdiantoro *et al.*, 2019;

*Korespondensi Penulis:

email: hasan_adimu@usn.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v12i1.10573>

Zulham, *et al.*, 2020). Pengelolaan perikanan skala kecil lebih ditujukan pada tingkatan rumah tangga nelayan, penangkapan ikan tanpa atau dengan kapal ikan berukuran < 5GT, dan penggunaan alat tangkap yang dioperasikan hanya oleh tenaga manusia (Halim *et al.*, 2018). Sebagian besar rumah tangga nelayan hidup di wilayah pesisir yang jauh dari pusat kota. Jika merujuk pada definisi pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, nelayan skala kecil adalah nelayan yang dalam aktivitas kesehariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan kapal perikanan berukuran paling besar 5 gross ton (GT).

Kabupaten Kolaka merupakan pintu gerbang ekonomi sebelah barat Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagian besar wilayah Kolaka merupakan perairan (laut) seluas sekitar 15.000 km² dengan panjang garis pantai ±295.855 km serta memiliki 13 gugusan pulau kecil (BPS, 2020). Potensi sumber daya perikanan Kabupaten Kolaka cukup besar, baik potensi sumber daya perikanan laut, darat, maupun perikanan budi daya (Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka, 2019). Tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap pada tahun 2015 sebesar 21.423,9 ton dengan nilai potensi lestari maksimum (*maximum sustainable yield*) sekitar 37.500 ton per tahun. Dari produksi yang dicapai tersebut, 65% merupakan produksi ikan pelagis (tuna, cakalang, tenggiri, teri, layang, tembang, peperek) dan ikan campuran. Daerah penangkapan (*fishing ground*) nelayan sebagian besar berada pada kawasan Teluk Bone yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713. Berdasarkan prediksi potensi perikanan di Teluk Bone khususnya cakalang (*K. Pelamis*) untuk dimanfaatkan sebesar 22.561,4 ton per upaya, penangkapan optimum 1.730 unit/tahun dengan hasil tangkapan yang diperbolehkan sebesar 18.049,2 ton per tahun (Umar *et al.*, 2019). Potensi ini jika ditingkatkan akan membawa dampak positif bagi industri perikanan.

Permasalahan krusial dalam pengelolaan usaha perikanan tangkap adalah penangkapan berlebih (*overfishing*), penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (Anwar & Wahyuni, 2019; Kusdiantoro *et al.*, 2019; Wahyudi & Sutisna, 2021).

Masalah kemiskinan pada nelayan skala kecil makin diperparah oleh penurunan

produktivitas perikanan tangkap dan adanya konflik antarnelayan. Terdapat tiga kelompok nelayan miskin yang teridentifikasi, yaitu sebagian besar merupakan buruh kapal ikan, pemilik perahu skala kecil, dan pedagang kecil hasil dari penangkapan ikan (Vatria, 2021).

Masalah utama yang ditemukan dalam pembangunan perikanan skala kecil adalah karakteristiknya yang berbeda-beda dan masalah kelembagaan (Vatria, *et al.*, 2019). Ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya ikan dan kapasitas pelaku usaha masih menjadi perhatian utama dalam mewujudkan perikanan tangkap (Kusdiantoro *et al.*, 2019). Penangkapan ikan berlebih tak terlepas dari masalah ekonomi nelayan. Selain itu, kemiskinan masih dialami oleh kelompok nelayan skala kecil, tidak terkecuali di Kabupaten Kolaka. Kemiskinan nelayan skala kecil dapat diukur dari pendapatan, pengeluaran, dan penerimaan (Yonvitner *et al.*, 2021). Selain itu, terdapat masalah tingkat pendidikan, minimnya pencatatan data, dan kurangnya pemahaman terkait penggunaan *geografis position system* (GPS) pada saat melaut (Wahyudi & Sutisna, 2021). Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa pengelolaan perikanan tangkap merupakan hal yang penting dan perlu perhatian semua pemangku kepentingan (*stakeholder*). Menurut Irham & Iksan (2021), perikanan tangkap dapat menjadi salah satu komoditas unggulan bagi setiap daerah kepulauan. Perlu pula adanya pendekatan analisis keberlanjutan untuk melihat semua dimensi terkait perikanan tangkap skala kecil (Nababan *et al.*, 2007). Peran pemerintah dalam pengembangan usaha perikanan tangkap perlu ditingkatkan, khususnya dalam ekonomi, agar kesejahteraan nelayan kecil dapat meningkat. Masalah tingkat kesejahteraan nelayan merupakan salah satu isu utama di Kabupaten Kolaka. Oleh sebab itu, perlu ada kajian terkait pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil mengingat sebagian kawasan Kabupaten Kolaka merupakan wilayah pesisir dan terdapat aktivitas perikanan di mana-mana. Hal serupa terjadi di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Kabupaten Indramayu (Triyanti & Firdaus, 2016).

Menurut Yusuf & Muhartono (2018), strategi pengembangan usaha perikanan tangkap dilakukan dengan pembangunan transportasi dan pembangunan pabrik es dan kelengkapan pendukung lainnya. Selain itu, nelayan juga dapat melakukan strategi *coping* dengan mencari pekerjaan sampingan (Yuniarti, 2021).

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui potensi pengembangan usaha perikanan skala kecil dan (2) menganalisis tingkat efisiensi jenis alat tangkap nelayan di Kabupaten Kolaka. Dalam menunjang tujuan tersebut dilakukan penilaian aspek ekonomi seperti permodalan, pembiayaan, penerimaan, dan keuntungan dalam periode produksi tertentu.

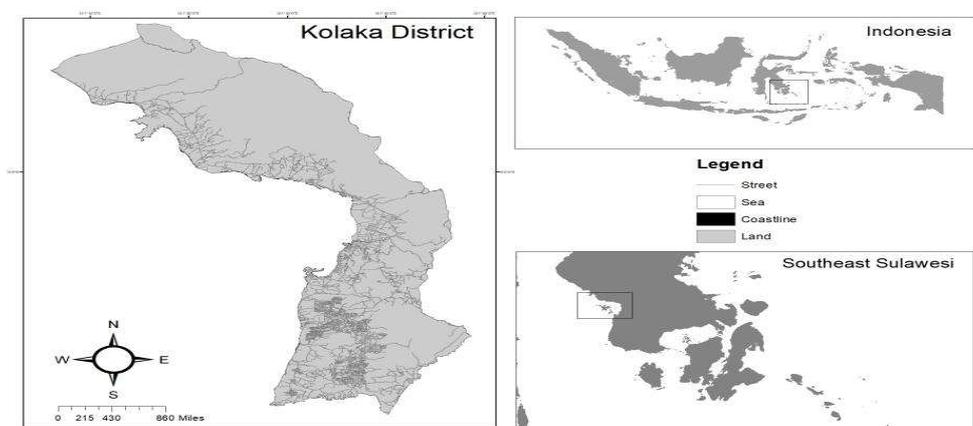
Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pelaksanaan selama bulan Juni hingga November 2021 dan dengan fokus utama pada nelayan skala kecil. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder melalui pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data mengacu pada teknik yang dilakukan oleh Sangadji & Sopiah (2010), yaitu penyebaran kuesioner yang dilanjutkan dengan pengisian kuesioner oleh responden. Kuesioner tersebut digunakan sebagai pedoman wawancara dengan bertanya langsung kepada responden atau informan kunci. Jumlah responden terdiri atas tiga puluh nelayan dan empat dari instansi dinas perikanan Kabupaten Kolaka. Informan dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling* yang dalam hal ini peneliti menentukan informan dengan pertimbangan tertentu. Salah satu pertimbangannya adalah informan telah lama bermukim lebih dari 20 tahun di Kabupaten Kolaka dan memiliki pengetahuan terkait perikanan skala kecil. Komponen pertanyaan difokuskan pada jumlah kapal/perahu, jumlah alat tangkap, produksi ikan, dan biaya yang dikeluarkan setiap melakukan penangkapan ikan. Selain itu, data diperoleh dari instansi terkait, yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka, berupa penelusuran dokumen laporan, arsip data serta kebijakan perikanan. Analisis yang digunakan terdiri atas analisis pendapatan dan analisis efisiensi usaha

(Soekartawi, 2002) serta analisis MSY Gordon Schaefer. Selain itu, dilakukan analisis kebijakan yang merujuk pada analisis sebagaimana yang dilakukan Patton, Sawicki, & Clark (2015), yaitu dengan menyintesis informasi melalui penelusuran laporan, artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan perikanan skala kecil.

Definisi dan Permasalahan Perikanan Skala Kecil

Perikanan skala kecil dapat diartikan sebagai aktivitas yang dinamis untuk memanfaatkan sumber daya perikanan laut yang dapat dilakukan penuh waktu, paruh waktu, atau musiman. Produksi perikanan pada skala ini ditargetkan untuk memasok produk ikan ke pasar lokal dan domestik atau untuk konsumsi keseharian. Namun, pada beberapa dekade terakhir ini, produksi ekspor perikanan skala kecil telah meningkat akibat globalisasi dan permintaan pasar (FAO, 2006). Perikanan skala kecil atau perikanan tradisional lebih banyak dikerjakan oleh rumah tangga nelayan dengan teknologi penangkapan yang masih rendah dan minimnya modal serta kegiatan produksi hingga pemasaran dilakukan secara mandiri. Aktivitas kegiatan perikanan relatif kecil dengan kegiatan penangkapan dilakukan di sekitar pantai yang terjangkau. Fokus area adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal dengan peralatan penangkapan yang minim. Di berbagai negara, kegiatan perikanan skala kecil berkontribusi terhadap ketersediaan pangan serta membantu dalam pengurangan kemiskinan.

Dalam upaya meningkatkan kontribusi perikanan skala kecil pada sektor perikanan, terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi, seperti penangkapan berlebih (*over eksploitasi*)



Gambar 1 Lokasi Penelitian.
Figure 2 Research Location.

sumber daya perikanan, ancaman terhadap ekologi dan ekosistem, perubahan sistem kebijakan pengelolaan perikanan, perkembangan teknologi yang pesat, dan perubahan demografi wilayah. Kurangnya waktu dan akses ke sumber informasi yang diperlukan merupakan kendala dalam memenuhi kebutuhan informasi nelayan. Kebutuhan informasi yang paling penting antara lain informasi tentang alat tangkap, harga ikan, dan cuaca (Rachman *et al.*, 2019). Permasalahan lain yang menghambat kelangsungan perikanan skala kecil adalah pencemaran, degradasi lingkungan, dampak perubahan iklim, dan bencana alam. Seluruh faktor ini mengakibatkan nelayan skala kecil dan nelayan buruh serta komunitasnya sulit menyampaikan aspirasi, mempertahankan hak-hak kemanusiaan dan hak kepemilikan, serta sulit memperoleh jaminan dalam kelangsungan pemanfaatan sumber daya perikanan di tempat mereka bergantung (FAO, 2006).

Kondisi Umum Perikanan Skala Kecil di Kolaka

Secara umum perikanan skala kecil di Kolaka masih sangat bergantung kepada pemilik modal usaha untuk menjalankan kegiatan perikanan. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan masih rendah. Ketergantungan kepada pemilik modal atau pinjaman lebih sering digunakan untuk membeli perahu dan alat tangkap. Kegiatan keseharian masih tradisional dengan jangkauan teknologi yang masih minim. Jika memiliki modal sendiri, sebagian pelaku perikanan skala kecil mendapatkan modal tersebut dari hasil kegiatan sampingan seperti berdagang atau memiliki keterampilan lainnya selain menangkap ikan. Upaya pengelolaan dan pendampingan terus dilakukan pemerintah setempat melalui Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka untuk keberlanjutan perikanan skala kecil yang lebih baik.

Potensi sumber daya perikanan di Kolaka cukup besar bagi pengembangan usaha perikanan.

Jika potensi ini dimanfaatkan dengan optimal, tidak menutup kemungkinan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi akan ikut meningkat. Tingkat pemanfaatan dan potensi secara umum sumber daya perikanan di Kabupaten Kolaka dapat dilihat pada Tabel 1.

Perubahan jumlah dan jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan akan berubah seiring dengan pendapatan yang diperoleh. Makin tinggi pendapatan alat tangkap yang digunakan, jenis alat tangkap makin bervariasi. Selain itu, perubahan pola musim akan menentukan jenis alat tangkap yang akan digunakan. Namun, di sisi lain, ketidakmampuan ekonomi membuat nelayan tidak dapat mengganti kelengkapan peralatan yang digunakan. Jumlah unit menurut jenis alat tangkap disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 . Alat Tangkap Ikan di Perairan Kabupaten Kolaka, 2020.

Table 2. Fishing Equipment in the Waters of Kolaka, 2020.

No	Jenis Alat/Tool type	Jumlah/ Total
1	Pukat pantai/ <i>Beach trawler</i>	10
2	Pukat cincin/ <i>Trawl ring</i>	1
3	Jaring insan hanyut/ <i>The human web is drifting</i>	15
4	Jaring isan tetap/ <i>Fixed human web</i>	298
5	Bagan perahu/ <i>Floating chart/drum</i>	18
6	Rawai dasar/ <i>Basic longline</i>	558
7	Huhate/ <i>Huhate</i>	12
8	Pancing tonda/ <i>Fishing rod</i>	24
9	Pancing ulur (<i>hand fishing</i>)	627
10	Pancing cumi/ <i>Squid fishing</i>	39
11	Pancing berjoran/ <i>Fishing rod</i>	46
12	Sero/ <i>Sero</i>	40
13	Bubu/ <i>Bubu</i>	72
14	Muro ami/ <i>Muro ami</i>	5
15	Jala jatuh berkapal/ <i>Mesh falling ship</i>	27
16	Tombak/ <i>Spear</i>	4
17	Ladung/ <i>Stagnant</i>	6
18	Payang/ <i>Payang</i>	19
Total		1.850

Tabel 1 Potensi Sumber Daya Perikanan di Kabupaten Kolaka.

Table 1 Potential of Fishery Resources in Kolaka District.

No	Potensi Perikanan/ <i>Fishery Potential</i>	Dugaan Potensi/ <i>Alleged Potential</i>		Tingkat Pemanfaatan/ <i>Utilization Rate</i>	
		Jumlah/ Total	Satuan/ Unit	Tampung/ Volume	(%)
1	Perikanan laut / <i>Marine fishery</i>	27.500	Ton/Thn	14.271,96	51,89
2	Budi daya air payau/ <i>Brackish water cultivation</i>)	8.500	ha	4.970,55	58,47
3	Budi daya air tawar/ <i>Fresh water cultivation</i>)	500	ha	94,2	18,83
4	Budi daya laut/ <i>Marine cultivation</i>)	7.000	ha	2.105	30,0

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka, 2019/*Source: Kolaka Fishery Departement, 2019.*

Alat tangkap pancing, rawai dasar, dan jaring insang lebih dominan digunakan jika dibandingkan dengan jenis alat tangkap lainnya. Jaring insang yang digunakan oleh nelayan di Kabupaten Kolaka berukuran *mesh size* 1,3--1,4 inci. Alat tangkap jaring insang dengan *mesh size* 1,4 inci memiliki nilai efisiensi paling tinggi jika dibandingkan dengan ukuran lainnya (Putri et al., 2018). Nelayan yang berada di Kabupaten Kolaka tersebar di setiap kecamatan. Data lengkap jumlah nelayan dapat dilihat pada Tabel 3. Kecamatan Pomalaa merupakan penyumbang terbesar jumlah nelayan di Kabupaten Kolaka. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Pomalaa hidup sebagai nelayan, termasuk komunitas Bajau yang telah lama ikut bermukim.

Pengelolaan Usaha Perikanan Nelayan Skala Kecil

Selain usaha perikanan pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana dasar bidang perikanan terus dikembangkan seiring dengan kebutuhan dan permintaan. Selain itu, kegiatan pembangunan nonfisik juga digalakkan, seperti pembinaan kelembagaan berbasis perikanan melalui diversifikasi bahan pangan lokal, sosialisasi metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan, pemahaman tentang pelestarian sumber daya ikan, dan pengolahan ikan akan terus dikembangkan. Penyuluhan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kolaka untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan,

khususnya di bidang teknologi sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas usahanya serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya. Berbagai metode penyuluhan yang dilakukan, seperti ceramah, pameran, poster, dan selebaran (*leaflet*), dilaksanakan dengan pendekatan perseorangan ataupun kelompok.

Keadaan usaha penangkapan ikan nelayan skala kecil di Kabupaten Kolaka dilihat dari beberapa aspek, seperti modal usaha, biaya tetap, biaya tidak tetap, usaha penangkapan, hasil tangkapan, sistem bagi hasil, dan upah tenaga kerja. Modal usaha menjadi salah satu aspek yang menggambarkan keadaan usaha penangkapan ikan, contohnya ikan cakalang dari para nelayan di Kabupaten Kolaka sebagai bentuk nilai yang bergerak yang dimiliki oleh nelayan dalam menjalankan usahanya. Berikut ini adalah data besar modal usaha dari para nelayan yang diintervalkan mulai <Rp1.000.000,00 sampai dengan >Rp4.000.000,00. Modal usaha nelayan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Modal Usaha Nelayan di Kabupaten Kolaka.
Table 4. Fishermen's Business Capital in Kolaka District.

Interval Modal Usaha Nelayan (Rp)/Fisherman Business Capital Interval (IDR)	Frekuensi Nelayan/Fisherman Frequency	(%)
< 1.000.000	39	27,1
1.000.000 - 2.000.000	55	38,2
3.000.000 - 4.000.000	35	24,3
> 4.000.000	15	10,4
Total	144	100

Tabel 3 Jumlah Nelayan yang Tersebar di Kabupaten Kolaka, 2020.
Table 3 Number of Fishermen Scattered in Kolaka District, 2020.

No	Kecamatan/ Subdistric	Jumlah Nelayan/ Number of Fishermen	Jenis Nelayan/Type of Fisherman		
			Penuh/ Full	Sambilan Utama/ Main Side	Sambilan Tambahan/Extra Part Time
1	Iwoimendaa	340	289	34	17
2	Wolo	428	364	43	21
3	Samaturu	637	541	64	32
4	Latambaga	542	461	54	27
5	Kolaka	57	48	6	3
6	Wundulako	16	14	2	0
7	Baula	0	0	0	0
8	Pomalaa	1.238	1.052	124	62
9	Tanggetada	714	607	71	36
10	Polinggona	0	0	0	0
11	Watubangga	194	165	19	10
12	Toari	131	111	13	7
Total		4.297	3.652	430	215

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka, 2019/Source: Kolaka Fishery Departement., 2019.

Umumnya nelayan di Kabupaten Kolaka memiliki modal usaha antara Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp2.000.000,00. Modal yang dimiliki tersebut para nelayan memulai usaha penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kesejahteraannya. Modal usaha mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan berhasil tidaknya suatu usaha yang didirikan. Modal dapat dibagi menjadi (1) modal tetap, yaitu modal yang memberikan jasa untuk proses usaha dalam jangka waktu yang relatif lama dan tidak terpengaruh oleh besar kecilnya usaha dan (2) modal lancar, yaitu modal yang memberikan jasa hanya sekali dalam usaha yang dijalankan, bisa dalam bentuk bahan-bahan baku dan kebutuhan lain sebagai penunjang usaha tersebut.

Faktor yang menyebabkan rendahnya pembentukan modal usaha adalah rendahnya pendapatan nelayan yang menyebabkan rendahnya tabungan yang sangat penting dalam pembentukan modal. Rendahnya produktivitas yang berakibat pada laju pertumbuhan pendapatan, tabungan, dan pembentukan modal menjadi rendah, serta alasan kependudukan yang sangat tinggi akan menyebabkan pendapatan per kapita yang menurun. Dengan demikian, akan terjadi kekurangan dana dan akumulasi modal dalam pembiayaan pembangunan dan kekurangan peralatan modal serta keterbelakangan teknologi.

Pengembangan Usaha Perikanan

Pengembangan usaha perikanan skala kecil adalah penilaian tentang usaha yang berkelanjutan

yang dapat dikelola nelayan dan pengusaha perikanan. Aspek yang diamati adalah efisiensi usaha berdasarkan pendapatan, rasio R/C. Salah satu aspek untuk melihat pengembangan perikanan adalah dengan mengetahui pendapatan yang diperoleh oleh nelayan (Sari & Rauf, 2020). Analisis pendapatan usaha dilakukan untuk menghitung besarnya total pendapatan yang diperoleh dari suatu usaha (Wijayanto & Yulianto, 2013). Rata-rata total biaya usaha per bulan untuk penangkapan ikan nelayan skala kecil berdasarkan alat tangkap dapat dilihat pada Tabel 5.

Berdasarkan data Tabel 5, hasil analisis pendapatan berdasarkan alat tangkap nelayan skala kecil yang tertinggi adalah alat tangkap bagan, yaitu Rp8.567.343,75 per bulan, dan terendah adalah alat tangkap pancing tonda, yaitu Rp1,397,946,91 per bulan. Untuk mengetahui sejauh mana efisiensi dari modal yang dilaksanakan dalam kegiatan usaha penangkapan cakalang, dilanjutkan dengan analisis R/C. Makin besar R/C berarti makin tinggi efisiensi modal yang digunakan dalam menentukan usaha tersebut. R/C juga menunjukkan berapa besar keuntungan yang akan diperoleh dari setiap satuan investasi yang dikeluarkan oleh pelaku usaha sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel 6.

Analisis aspek teknis dan ekonomis dilakukan juga pada jaring insang dan layak secara ekonomis.

Tabel 5. Penerimaan dan Pendapatan Perbulan Berdasarkan Alat Tangkap Nelayan Skala Kecil di Kabupaten Kolaka Tahun 2021.

Table 5. Monthly Revenue and Income Based on Small Scale Fishing Equipment in Kolaka Regency in 2021.

Alat Penangkapan/ Catch Tool	Penerimaan/ Reception	Biaya Oprasional/ Operational Cost	Pendapatan Bulanan/ Monthly Income
Pancing tonda/ <i>Fishing rod</i>	6.384.090,91	4.986.144,00	1.397.946,91
Bagan/ <i>Chart</i>	30.187.500,00	21,620,156,00	8.567.343,75
Jala jatuh berkapal/ <i>Don't fall ship</i>	10.553.636,36	7.433.365,79	3.120.270,57
Pancing rawai/ <i>Rawai fishing</i>	7.800.000,00	5.848.074,00	1.951.926,00

Tabel 6. Kelayakan Usaha Berdasarkan Alat Tangkap, 2021.

Table 6. Business Feasibility Based on Fishing Equipment, 2021.

Alat Penangkapan/ <i>Catch Tool</i>	TR	TC	R/C
Pancing tonda/ <i>Fishing rod</i>	6.384.090,91	4.986.144,00	1,2
Bagan/ <i>Chart</i>	30.187.500,00	21.620.156,00	1,5
Jala jatuh berkapal/ <i>Don't fall ship</i>	10.553.636,36	7.433.365,79	1,4
Pancing rawai/ <i>Rawai fishing</i>	7.800.000,00	5.848.074,00	1,3

Berdasarkan hasil analisis R/C, efisiensi usaha penangkapan berkisar antara nelayan skala kecil 1,2 sampai dengan 1,5. Dalam hal ini, bagan dan jala jatuh berkapal merupakan alat tangkap yang paling efisien dengan nilai R/C sebesar 1,5 dan 1,4, sedangkan yang terendah efisiensinya adalah pancing tonda dan pancing rawai. Nilai R/C sebesar 1,1 nilai R/C = 1,5 berarti bahwa setiap C = 1 maka R = 1,5 berarti dari setiap 1 rupiah biaya (*cost*) = $1,5 - 1 = 0,5$. Dengan demikian, profitabilitas usaha bagan adalah $0,5/1 \times 100 = 50\%$. Sementara itu, R/C pancing tonda adalah sebesar 1,2. Artinya, setiap C = 1 maka R = 1,2 yang artinya dari 1 rupiah biaya (*cost*) = $1,2 - 1 = 0,2$ sehingga profitabilitas usaha pancing tonda adalah $0,2 / 1 \times 100 = 20\%$. Strategi peningkatan dalam produktivitas perikanan skala kecil dapat diperkuat dengan dukungan kebijakan melalui peraturan daerah (perda) serta peningkatan penyuluhan (Amarullah, 2017). Musim juga merupakan faktor yang memengaruhi efisiensi usaha penangkapan ikan (Cahya et al., 2016).

Kebijakan Pemerintah pada Perikanan Skala Kecil: Pengalaman dari Beberapa Negara

Kebijakan perikanan skala kecil saat ini di Indonesia adalah mendukung kembali kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Sistem dari beberapa bentuk kearifan lokal yang ada saat ini diadopsi sebagai model untuk memperkuat kebijakan perikanan skala kecil, seperti pencadangan lokasi untuk perlindungan ekosistem pesisir dan laut dan berbagai kegiatan lainnya. Kondisi berbeda saat ini terjadi di Kolaka, yaitu bentuk kearifan lokal untuk melindungi sumber daya belum ada. Perlu upaya pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya mendukung kegiatan perikanan, tetapi juga dari sisi perlindungan ekosistem. Oleh sebab itu, perlu dukungan dari semua pihak yang berkepentingan untuk membangun sektor perikanan.

Terdapat pengalaman dari berbagai negara dalam kebijakan perikanan skala kecil seperti di Filipina, Pulau Solomon, dan Tanzani. Bentuk kebijakan perikanan skala kecil dilakukan melalui pemerintah daerah dengan lebih difokuskan pada daerah *inshore* atau dekat dengan pantai, tempat terdapatnya industri penangkapan. Selain itu, beberapa sektor yang saling berdampingan dengan perikanan skala kecil adalah perikanan budi daya. Pulau Solomon menerapkan kebijakan

perikanan skala kecil melalui akses terbuka dengan terpeliharanya sistem lembaga adat yang kuat dalam melindungi sumber daya pesisir dan laut. Sementara itu, di Tanzania, bentuk kebijakan akses terbuka dalam perikanan skala kecil adalah dengan pengelolaan *co-management* dengan melibatkan semua unsur lembaga yang ada di wilayah tersebut (Eriksson et al., 2016). Praktik pengelolaan perikanan skala kecil di India sangat heterogen sehingga dalam merumuskan kebijakan melibatkan unsur lembaga masyarakat di tingkat bawah untuk mencapai keberhasilan tata kelola perikanan (Baiju et al., 2022).

Kebijakan perikanan skala kecil di Eropa, yaitu di Denmark sebagai anggota Uni Eropa (UE), dilakukan dengan pengelolaan perikanan terpusat atau *centralized*. Di sana diterapkan bentuk kebijakan bersama *Common Fisheries Policy* (CFP), yaitu sistem yang sebagian besar keputusan mengenai langkah-langkah pengelolaan perikanan dibuat secara kolektif di tingkat UE dengan penerapan langsung di perairan negara-negara anggota berdasarkan *Total Allowable Catches* (TACs) yang diadakan setiap tahun (Autzen & Hegland, 2021). Namun, sistem kebijakan yang dikembangkan di Eropa itu berbeda dengan di Asia atau Indonesia. Kebijakan CFP hanyalah contoh penerapan pengelolaan perikanan yang ada di beberapa negara. Dalam kaitannya dengan kebijakan perikanan yang ada di Kolaka, yaitu dalam hal upaya peningkatan pengelolaan, diperlukan keterlibatan semua unsur lembaga dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Pemahaman terkait perikanan skala kecil telah diuraikan berdasarkan FAO. Dalam hal ini, perikanan skala kecil difokuskan pada rumah tangga nelayan yang aktivitas kesehariannya masih tradisional, lokasi penangkapan ikan yang tidak jauh dari wilayah pesisir atau permukiman, serta kemampuan modal dalam usaha masih sangat minim. Permasalahan yang umumnya dijumpai pada perikanan skala kecil merujuk pada apa yang dinyatakan oleh Rachman et al. (2019), yaitu bahwa akses informasi nelayan kecil yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan yang masih rendah, seperti dampak alat tangkap terhadap sumber daya, harga ikan yang rendah di nelayan, dan informasi keberadaan cuaca yang cepat berubah. Permasalahan utama pada nelayan skala kecil di Kabupaten Kolaka adalah akses modal serta tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir yang masih rendah.

Upaya pengembangan usaha perlu dilakukan agar tingkat pendapatan meningkat dan dirasakan oleh nelayan sehingga akses modal lebih mudah dan tidak lagi bergantung pada pihak lain. Salah satunya adalah dengan melihat keberadaan alat tangkap yang digunakan. Berdasarkan hasil hitungan tingkat efisiensi, alat tangkap bagan dan jala jatuh berkapal tertinggi, sedangkan pancing tonda dan rawai terendah. Artinya, dari empat alat tangkap yang dinilai, nelayan yang menggunakan alat tangkap dengan efisiensi terendah perlu melakukan pengembangan usaha. Bentuk pengembangan usaha yang dilakukan dapat berupa peralihan alat tangkap yang digunakan ke bagan atau jala jatuh berkapal atau dengan meningkatkan armada tangkap yang digunakan.

Bentuk kebijakan dalam pengelolaan perikanan skala kecil di Kabupaten Kolaka dikelola Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Dengan demikian, UPTD perlu diberikan saran dalam upaya pengembangan usaha perikanan skala kecil. Jika melihat pengalaman di berbagai tempat dan di beberapa negara, pengelolaan perikanan skala kecil melibatkan semua komponen elemen dalam upaya peningkatan ekonomi, seperti lembaga lokal/adat dan keterlibatan pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam mewujudkan pengelolaan perikanan skala kecil yang berkelanjutan. Hal ini perlu diterapkan sebagai upaya pengembangan usaha perikanan skala kecil di Kabupaten Kolaka. Namun, dalam penerapannya tetap harus disesuaikan dengan sistem kebijakan yang sudah berjalan saat ini di Indonesia. Analisis struktural sistem di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat peubah yang sangat berpengaruh, yaitu produksi perikanan tangkap, IUU *fishing*, kebijakan perikanan tangkap, dan biaya melaut, sedangkan yang memiliki tingkat ketergantungan paling tinggi adalah stok ikan dan industri perikanan (Megawanto, Fauzi, Adrianto, & Hidayat, 2020). Selain itu, pengembangan sektor perikanan dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pengguna sumber daya tersebut (Adam & Surya, 2013).

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Perikanan tangkap skala kecil merupakan kegiatan penangkapan ikan yang paling besar di Kabupaten Kolaka selain budi daya perikanan. Sektor perikanan menjadi salah satu sektor yang memberi kontribusi ekonomi untuk pembangunan daerah dan sebagai mata pencaharian utama

masyarakat di wilayah pesisir. Penangkapan ikan menggunakan beberapa alat tangkap. Jika dilihat kontribusi terhadap pendapatan, empat alat tangkap yang sering digunakan sebagai pembanding adalah pancing tonda, bagan, jala jatuh berkapal, dan rawai. Efisiensi tertinggi berdasarkan nilai profitabilitas adalah pada alat tangkap bagan dan jala jatuh berkapal, sedangkan yang rendah adalah pada alat tangkap pancing tonda dan pancing rawai. Pengembangan usaha perikanan khususnya pada alat tangkap yang memiliki nilai efisiensi rendah perlu bantuan modal yang besar untuk meningkatkan nilai pendapatannya.

Usaha perikanan akan memberi dampak yang baik apabila segala aspek pengembangan usaha dapat dipenuhi. Penerimaan dan pendapatan akan ditentukan berdasarkan modal yang diperoleh serta alat tangkap yang digunakan. Implikasi kebijakan saat ini yang diterapkan kepada nelayan skala kecil masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam pemberian modal usaha. Modal usaha dapat diberikan secara langsung kepada nelayan dengan tidak melalui perantara. Sebagai alternatif kebijakan, pemerintah memberikan bantuan modal langsung kepada nelayan sesuai dengan alat tangkap yang digunakan. Namun, pemerintah dapat juga menyiapkan bantuan lain seperti menyiapkan alat tangkap yang memiliki efisiensi tertinggi agar nelayan dapat langsung merasakan manfaatnya.

Kebijakan perikanan skala kecil di Kabupaten Kolaka dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perikanan Tangkap, khususnya pada bidang pemberdayaan nelayan skala kecil. Salah satu tugas dan fungsinya adalah memberikan pemahaman terkait iptek dan informasi nelayan kecil, pembinaan kelembagaan nelayan kecil, dan pendampingan nelayan kecil. Jika merujuk pada pengalaman berbagai negara, kebijakan perikanan skala kecil di Kabutaen Kolaka memerlukan lembaga nonpemerintah bentukan masyarakat/komunitas untuk mendukung atau memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam memperjuangkan keberlanjutan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sembilan Belas November Kolaka atas dana penelitian tahun 2021 yang diberikan.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dengan ini, kami nyatakan terkait kontribusi setiap penulis dalam pembuatan karya tulis, penulis yang berkontribusi adalah Ramlah S. sebagai kontributor utama serta Hasan Eldin Adimu, Asni, dan Latifa Fekri sebagai kontributor anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L., & Surya, T. A. (2013). Kebijakan pengembangan perikanan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 195–211. Diakses dari <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/53>.
- Amarullah, T. (2017). Strategy of productivity improvement of sustainable small. *Jurnal Perikanan Tropis*, 4(1), 11–21.
- Anwar, Z., & Wahyuni. (2019). Miskin di laut yang kaya : Nelayan Indonesia. *Sosioreligius*, 1(4), 52–60.
- Autzen, M. H., & Hegland, T. J. (2021). When 'sustainability' becomes the norm: power dynamics in the making of a new eco-label for low-environmental-impact, small-scale fisheries. *Marine Policy*, 133(June). <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104742>.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Data Statistik Kabupaten Kolaka*. Badan Pusat Statistik. Kolaka (ID): BPS.
- Baiju, K. K., Parappurathu, S., Abhilash, S., Ramachandran, C., Swathi Lekshmi, P. S., Padmajan, P., ... Kaleekal, T. (2022). Achieving governance synergies through institutional interactions among non-state and state actors in small-scale marine fisheries in India. *Marine Policy*, 138(February). <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.104990>
- Cahya, C. N., Setyohadi, D., & Surinati, D. (2016). Pengaruh parameter oseanografi terhadap distribusi ikan. *Oseana*, 41(4), 1–14.
- Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka. (2019). *Data Statistik Perikanan Tahun 2019*. Kolaka.
- Eriksson, H., Adhuri, D. S., Adrianto, L., Andrew, N. L., Apriliani, T., Daw, T., ... Beare, D. J. (2016). An ecosystem approach to small-scale fisheries through participatory diagnosis in four tropical countries. *Global Environmental Change*, 36, 56–66. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.11.005>
- FAO. (2006). *Small-scale fisheries: Assessing their contribution to rural livelihoods in developing countries*. Rome.
- Halim, A., Wiryawan, B., Loneragan, N. R., Hordyk, A., Sondita, M. F. A., White, A. T., ... Yuni, C. (2018). Developing a functional definition of small-scale fisheries in support of marine capture fisheries management in Indonesia. *Marine Policy*, (April), 0–1. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.11.044>
- Irham, & Iksan, K. H. (2021). Pengembangan perikanan tangkap berbasis komoditas unggulan di Kabupaten Kepulauan Sula. *Jurnal Ilmu Kelautan Kepulauan*, 4(2), 435–445.
- Kusdiantoro, Fahrudin, A., Wisudo, S. H., & Juanda, B. (2019). Perikanan tangkap di Indonesia potret dan tantangan keberlanjutan. *J.Sosek KP*, 14(02), 145–162. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v14i2.8056>
- Manurung, V. T. (2016). Keragaan dan kelembagaan perkreditan usaha penangkapan ikan tuna skala kecil di kawasan Indonesia Timur. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 16(2), 60. <https://doi.org/10.21082/fae.v16n2.1998.60-74>.
- Megawanto, R., Fauzi, A., Adrianto, L., & Hidayat, A. (2020). Variabel-variabel yang berperan penting dalam sistem perikanan tangkap nasional. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis*, 12(2), 519–542. <https://doi.org/10.29244/jitkt.v12i2.28513>.
- Nababan, B. O., Dewita, Y., & Hermawan, M. (2007). *Analisis Keberlanjutan Perikanan Tangkap Skala Kecil di Kabupaten Tegal Jawa Tengah (Teknik Pendekatan Rappfish)*. 2(2), 137–158.
- Patton, C. V., Sawicki, D. S., & Clark, J. J. (2015). Basic methods of policy analysis and planning. In *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. <https://doi.org/10.4324/9781315664736>
- Rachman, Y. B., Mutiarani, H., Imaman, K. B., Rachman, M. A., & Salim, T. A. (2019). Information needs and sources of small scale traditional fishermen in Kaliadem Village, North Jakarta Indonesia. *Library Philosophy and Practice (e-Journal)*, 1(25), 2291.
- Sangadji, E. M., & Sopiah. (2010). *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (I). Yogyakarta: ANDI.
- Sari, P. T. I., & Rauf, A. I. M. (2020). Analisis pendapatan usaha perikanan tangkap: Pengalaman dari nelayan Kabupaten Garut Jawa Barat. *Ekono Insentif*, 14(1), 12–27. <https://doi.org/10.36787/jei.v14i1.200>.
- Soekartawi. (2002). *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian: Teori dan Aplikasi*. Jakarta.
- Stacey, N., Gibson, E., Loneragan, N. R., Warren, C., Wiryawan, B., Adhuri, D. S., ... Fitriana, R. (2021). Developing sustainable small-scale fisheries livelihoods in Indonesia: Trends , enabling and constraining factors, and future opportunities. *Marine Policy*, 132, 104654. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104654>.
- Triyanti, R., & Firdaus, M. (2016). Tingkat kesejahteraan nelayan skala kecil dengan pendekatan

- penghidupan berkelanjutan di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 11(1), 29. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v11i1.3170>.
- Umar, M. T., Safruddin, & Zainuddin, M. (2019). Potensi Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Cakalang (Katsuwonus Pelamis) di Perairan Teluk Bone Potencial utilization of skipjack tuna (Katsuwonus pelamis) in Bone Bay Abtrak Pendahuluan Sumber daya ikan yang berada di perairan Indonesia cenderung mengalami. *Torani: JFMarSci*, 2(2), 58–68.
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433. Tahun 2004, Jakarta.* (No. Tahun 2004). (n.d.). Jakarta.
- Vatria, B. (2021). FAO SSF Guidelines: Pedoman sukarela untuk menjamin keberlanjutan perikanan skala kecil di Indonesia. *Jurnal Vokasi*, 15(2), 88–98. <https://doi.org/10.31573/vokasi.v15i2.174>.
- Vatria, B., Wiryawan, B., Wiyono, E. S., & Baskoro, M. S. (2019). Klasterisasi karakteristik perikanan tangkap skala kecil di Kabupaten Kayong Utara. *Marine Fisheries: Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, 10(1), 95–106. <https://doi.org/10.29244/jmf.10.1>.
- Wahyudi, A., & Sutisna, D. (2021). Analisis perikanan tangkap skala kecil di TPI Pasir studi kasus: Nelayan KUB Mina Jaya. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, 15(1), 85–100. <https://doi.org/10.33378/jppik.v15i1.246>.
- Wijayanto, D., & Yulianto, T. (2013). *Analisis kelayakan usaha perikanan laut Kabupaten Kendal*. 8(2), 52–56.
- Yonvitner, Y., Wafi, H., Yulianto, G., Boer, M., & Kurnia, R. (2021). Small-scale fishermen: Poverty as a challenge to achieve Sustainable Development Goals (SDGs) in Sunda Strait. *Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, 34(1), 81. <https://doi.org/10.20473/mkp.v34i12021.81--92>.
- Yuniarti, D. (2021). Strategy coping dan pendapatan nelayan: Sebuah kajian empirik. *J.Sosek Kp*, 16(1), 1–11.
- Yusuf, R., & Muhartono, R. (2018). Strategi pengembangan usaha perikanan tangkap di Kabupaten Kayong Utara. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 7(2), 103. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v7i2.6459>
- Zulham, A., Hafsaridewi, R., Hikmah, Soejarwo, P. A., & Indah, B. V. (2020). Kesenjangan Gender pada pemanfaatan perikanan skala kecil di Kabupaten Natuna. *Buletin Ilmiah "MARINA" Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 6(2), 159–168. <https://doi.org/10.15578/marina.v6i2.8960>.